

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Kemlagi Tahun Anggaran 2021. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT.senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 15 April 2021

CAMAT KEMLAGI

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.MM

Pembina

NIP. 19681016 199303 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal 1
Daftar Isi	2
BAB I Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2021.....	9
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	16
BAB IV Penutup	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kemlagi merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kemlagi yang selanjutnya disingkat dengan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2016 – 2021.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi yang berpedoman pada RKPD Perubahan Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Revocusing Kecamatan Kemlagi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Mojokerto;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.

2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program / kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil
4. Langkah-langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan perubahan Renja OPD, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I TAHUN 2021

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah triwulan I tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2021

Dalam Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2021, pelaksanaan rencana kerja dapat dievaluasi sampai dengan Triwulan I tahun berjalan.

Berikut ini disajikan evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel Realisasi Renja Kecamatan Kemlagi berikut :

REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021

OPD : KEC. KEMLAGI

No. Urut	Kode Rekening Kegiatan	Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program (output)	ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA (Rp.)	%
				APBD 2021 (Rp.)	REFOCUSING	PAPBD 2021 (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	3.400.661.756	3.399.709.732	3.416.709.732	424.624.005	2.975.085.727	12,4%
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	25.000.000	22.332.335	22.332.335	3.537.650	21.462.350	15,8%
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun	10.000.000	9.164.060	9.164.060	1.660.000	8.340.000	18,1%
2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang dapat Tersusun	15.000.000	13.168.275	13.168.275	1.877.650	13.122.350	14,3%
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	3.052.585.178	3.065.691.778	3.065.691.778	378.879.063	2.673.706.115	12,4%
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	3.052.585.178	3.052.585.178	3.052.585.178	378.879.063	2.673.706.115	12,4%
4	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000	13.106.600	13.106.600		15.000.000	0,0%
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	0,0%
5	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya yang dapat Terpenuhi	12.000.000	12.000.000	12.000.000		12.000.000	0,0%
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	194.200.000	182.809.041	199.809.041	23.428.100	170.771.900	11,7%

6	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.807.650	6.192.350	22,6%
7	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68.000.000	68.000.000	85.000.000		68.000.000	0,0%
8	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik	53.000.000	47.609.041	47.609.041	11.926.000	41.074.000	25,0%
9	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2.288.550	6.711.450	25,4%
10	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	32.200.000	32.200.000	32.200.000	5.405.900	26.794.100	16,8%
11	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000	18.000.000	18.000.000	2.000.000	22.000.000	11,1%
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	72.228.778	72.228.778	72.228.778	13.382.342	58.846.436	18,5%
12	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.228.778	45.228.778	45.228.778	6.680.102	38.548.676	14,8%
13	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	27.000.000	27.000.000	27.000.000	6.702.240	20.297.760	24,8%
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	44.647.800	44.647.800	44.647.800	5.396.850	39.250.950	12,1%
14	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	24.647.800	24.647.800	24.647.800	3.637.850	21.009.950	14,8%
15	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	12.000.000	12.000.000	12.000.000	397.500	11.602.500	3,3%
16	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.361.500	6.638.500	17,0%
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		35.058.680	32.528.830	32.528.830	3.756.500	31.302.180	11,5%
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		35.058.680	32.528.830	32.528.830	3.756.500	31.302.180	11,5%
17	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		10.058.680	10.058.680	10.058.680	1.935.500	8.123.180	19,2%

18	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		25.000.000	22.470.150	22.470.150	1.821.000	23.179.000	8,1%
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		97.200.000	88.297.201	88.297.201	4.406.500	92.793.500	5,0%
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		97.200.000	88.297.201	88.297.201	4.406.500	92.793.500	5,0%
19	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		49.200.000	45.991.853	45.991.853	-	49.200.000	0,0%
20	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		48.000.000	42.305.348	42.305.348	4.406.500	43.593.500	10,4%
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum	76.000.000	76.000.000	76.000.000	4.055.250	71.944.750	5,3%
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	76.000.000	76.000.000	76.000.000	4.055.250	71.944.750	5,3%
21	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	52.000.000	52.000.000	52.000.000	3.019.750	48.980.250	5,8%
22	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24.000.000	24.000.000	24.000.000	1.035.500	22.964.500	4,3%
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	40.000.000	35.836.775	35.836.775	6.919.150	33.080.850	19,3%
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	40.000.000	35.836.775	35.836.775	6.919.150	33.080.850	19,3%
23	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	7.000.000	6.135.490	6.135.490		7.000.000	0,0%
24	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.000.000	10.556.060	10.556.060		12.000.000	0,0%

25	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.000.000	1.620.475	1.620.475		2.000.000	0,0%
26	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000	8.649.750	8.649.750	5.383.650	4.616.350	62,2%
27	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.000.000	8.875.000	8.875.000	1.535.500	7.464.500	17,3%
	JUMLAH			3.648.920.436	3.632.372.538	3.649.372.538	443.761.405	3.205.159.031	12,2%

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program , kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Dalam situasi kondisi pandemic saat ini Rancangan Awal RENJA kecamatan Kemlagi mengalami Perubahan Anggaran (RECOFUSING), yang tertuang pada table di bawah ini ;

Reviw Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota Mojokerto

Kecamatan Kemlagi

No.	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Pagu Indikator			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kemlagi	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%	3,415,661,756	3,399,709,732	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kemlagi	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%	3,415,661,756	Recofusing Anggaran
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 dokumen	25,000,000	22,332,335	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 dokumen	25,000,000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun	4 dokumen	10,000,000	9,164,060	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun	4 dokumen	10,000,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja yang dapat Tersusun	8 dokumen	15,000,000	13,168,275	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja yang dapat Tersusun	8 dokumen	15,000,000	
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	28 Laporan	3,067,585,178	3,065,691,778	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	28 Laporan	3,067,585,178	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Lap.	3,052,585,178	3,052,585,178	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Lap.	3,052,585,178	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Lap.	15,000,000	13,106,600	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Lap.	15,000,000	

11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	25 stell	12,000,000	12,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	25 stell	12,000,000	
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya yang dapat Terpenuhi	25 stell	12,000,000	12,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya yang dapat Terpenuhi	25 stell	12,000,000	
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	85%	194,200,000	182,809,041	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	85%	194,200,000	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,000,000	8,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,000,000	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	68,000,000	68,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	68,000,000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik	12 bulan	53,000,000	47,609,041	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik	12 bulan	53,000,000	0
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	9,000,000	9,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	9,000,000	
20	Penyediaan Bahan/Material		Jenis Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	32,200,000	32,200,000	Penyediaan Bahan/Material		Jenis Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	32,200,000	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	24,000,000	18,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 bulan	24,000,000	
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	85%	72,228,778	72,228,778	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	85%	72,228,778	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	45,228,778	45,228,778	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	45,228,778	

25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	27,000,000	27,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 bulan	27,000,000	
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	85%	44,647,800	44,647,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	85%	44,647,800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	1 Paket	24,647,800	24,647,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	1 Paket	24,647,800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	4 unit	12,000,000	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	4 unit	12,000,000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	1 paket	8,000,000	8,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	1 paket	8,000,000	
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35,058,680	32,528,830	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35,058,680	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	1080 pelayan	35,058,680	32,528,830	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	1080 pelayan	35,058,680	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	60 pelayan	10,058,680	10,058,680	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	60 pelayan	10,058,680	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1020 pela yanan	25,000,000	22,470,150	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1020 pela yanan	25,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan	81%	97,200,000	88,297,201	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan	81%	97,200,000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40 koor dinasi	97,200,000	88,297,201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40 koor dinasi	97,200,000	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	28 kegi atan	49,200,000	45,991,853	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	28 kegi atan	49,200,000	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 pembi naan	48,000,000	42,305,348	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 pembi naan	48,000,000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum	81%	76,000,000	76,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum	81%	76,000,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 koor dinasi	76,000,000	76,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20 koor dinasi	76,000,000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	20 koor dinasi	52,000,000	52,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	20 koor dinasi	52,000,000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20 koor dinasi	24,000,000	24,000,000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20 koor dinasi	24,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	81%	40,000,000	35,836,775	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	81%	40,000,000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Fasilitasi	40,000,000	35,836,775	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Fasilitasi	40,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Ds	7,000,000	6,135,490	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Ds	7,000,000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Ds	12,000,000	10,556,060	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Ds	12,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Ds	2,000,000	1,620,475	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Ds	2,000,000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Ds	10,000,000	8,649,750	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Ds	10,000,000	

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Ds			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Ds		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Ds			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Ds		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20 Ds	9,000,000	8,875,000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20 Ds	9,000,000	
					3,663,920,436	3,632,372,538					3,663,920,436	

Dampak dari perubahan anggaran (Recofusing), Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dan pendanaannya yang tertuang di table dibawah ini ;

TABEL
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEMLAGI
TAHUN 2021

SKPD KECAMATAN KEMLAGI

Kode	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	APBD 2021		USULAN TAHUN 2022		OPD PENANGGUNG JAWAB
			Sebelum Berubah (Rp.)	Sesudah Berubah (Rp.)	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	3,415,661,756	3,399,709,732	81%	3,413,232,978	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	25,000,000	22,332,335	12 dokumen	15,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun	10,000,000	9,164,060	4 dokumen	9,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang dapat Tersusun	15,000,000	13,168,275	8 dokumen	6,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	3,067,585,178	3,065,691,778	28 Laporan	3,068,585,178	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	3,052,585,178	3,052,585,178	14 Lap.	3,052,585,178	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,000,000	13,106,600	14 Lap.	16,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	12,000,000	12,000,000	25 stell	15,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya yang dapat Terpenuhi	12,000,000	12,000,000	25 stell	15,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	194,200,000	182,809,041	85%	197,000,000	Kec. Kemlagi

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	8,000,000	8,000,000	1 paket	15,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68,000,000	68,000,000	1 paket	78,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik	53,000,000	47,609,041	12 bulan	30,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9,000,000	9,000,000	2 jenis	12,000,000	Kec. Kemlagi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					9,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jenis Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	32,200,000	32,200,000	1 paket	27,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000	18,000,000	12 bulan	26,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	72,228,778	72,228,778	85%	63,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,228,778	45,228,778	12 bulan	35,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	27,000,000	27,000,000	12 bulan	28,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	44,647,800	44,647,800	85%	54,647,800	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	24,647,800	24,647,800	1 Paket	34,647,800	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	12,000,000	12,000,000	4 unit	12,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	8,000,000	8,000,000	1 paket	8,000,000	Kec. Kemlagi

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	35,058,680	32,528,830	81%	35,058,680	Kec. Kemlagi
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	35,058,680	32,528,830	1080 pelayanan	35,058,680	Kec. Kemlagi
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10,058,680	10,058,680	60 pelayanan		Kec. Kemlagi
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	25,000,000	22,470,150	1020 pelayanan	35,058,680	Kec. Kemlagi
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan	97,200,000	88,297,201	81%		Kec. Kemlagi
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97,200,000	88,297,201	40 koor dinasi		Kec. Kemlagi
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	49,200,000	45,991,853	28 kegiatan		Kec. Kemlagi
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	48,000,000	42,305,348	12 pembinaan		Kec. Kemlagi
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum	76,000,000	76,000,000	81%		Kec. Kemlagi
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	76,000,000	76,000,000	20 koor dinasi		Kec. Kemlagi
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	52,000,000	52,000,000	20 koor dinasi		Kec. Kemlagi

7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24,000,000	24,000,000	20 koor dinasi		Kec. Kemlagi
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	40,000,000	35,836,775	81%	300,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	40,000,000	35,836,775	100 Fasilitasi	300,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	7,000,000	6,135,490	20 Ds		Kec. Kemlagi
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12,000,000	10,556,060	20 Ds	45,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,000,000	1,620,475	20 Ds		Kec. Kemlagi
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10,000,000	8,649,750	20 Ds	14,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			20 fasilitasi	76,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			20 fasilitasi	167,000,000	Kec. Kemlagi
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9,000,000	8,875,000	20 Ds		Kec. Kemlagi
JUMLAH			3,663,920,436	3,632,372,538		3,748,291,658	

BAB IV PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Kecamatan Kemlagi merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Kemlagi selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2021, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD). Dalam rangka hal tersebut Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Kemlagi ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

**Mojokerto, 15 April 2021
CAMAT KEMLAGI**

**TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.MM
Pembina
NIP. 19681016 199303 1 007**